

Wabup HST terima bantuan dari Kerukunan Bubuhan Banjar Kalteng



Sumber gambar:

<https://kalsel.antaranews.com/berita/231849/wabup-hst-terima-bantuan-dari-kerukunan-bubuhan-banjar-kalteng>

Kerukunan Bubuhan Banjar (KBB) Kalteng juga ikut membantu masyarakat yang terdampak bencana banjir bandang di Kab HST, Bantuan di serahkan langsung oleh Ketua Umum PW KBB Kalteng H CHairuddin Halim dan Waka Kwarda Pramuka Kalteng yang juga Ketua PW KBB Kalteng dan sekaligus Kepala Biro administrasi Pembangunan Prov Kalteng H M Istani P Yunus diterima secara simbolis oleh Wakil Bupati HST Berry Nahdian Forqan di Posko Induk Stadion Murakata Barabai Mandingin, Senin.

Wakil Bupati HST Berry Nahdian Forqan menyampaikan merasa bangga dan terharu atas bantuan yang diserahkan dan bahkan kunjungan secara langsung bergantian ke Kab Hulu sungai Tengah tentu ini akan menambah semangat di daerah dalam rangka menangani dampak bencana banjir yang melanda.

"Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada KBB dan Kwarda Pramuka Prov Kalteng yang sampaikan bantuan sekaligus juga datang langsung berkunjung dan tentunya ini memberikan semangat dan spirit bagi kami untuk bisa bangkit dengan cepat.

Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan tentu ini akan sangat bermanfaat bagi warga kami dan insya Allah mudah-mudahan berkah bagi kita semua." tutupnya.

selanjutnya ketua umum PW KBB Kalteng H CHairuddin Halim menyampaikan bahwa kami datang ke sini karena prihatin merasa empati kepada warga kami yang ada di banua, kami turut merasakan melihat berita diberbagai media kami merasa terpanggil untuk datang dari KBB kami bawa 196 paket sembako.

"Mudahan cepat pulih perekonomiannya dan mudah-mudahan Allah SWT memberikan jalan yang terbaik untuk warga kita kembali membangun kampung halamannya rumahnya dan sebagainya untuk bisa berkehidupan sebagaimana layaknya," katanya.

Sementara Waka Kwarda Pramuka Prov Kalteng H M Istani P Yunus menyampaikan bantuan yang kami bawa adalah sumbangan dari orang Banua yang ada di Kalimantan Tengah dan warga masyarakat Kalimantan Tengah yang peduli terhadap musibah banjir yang ada di sungai Tengah.

"Dari Pramuka kami sampaikan bantuan sebanyak 356 paket sembako dan mudah-mudahan memberikan manfaat apa yang kami bawa ini, apa yang kami sampaikan ini, untuk membantu warga Banua yang ada di Kabupaten Hulu sungai Tengah ini," katanya.

Sumber berita:

1. <https://kalsel.antaranews.com/berita/231849/wabup-hst-terima-bantuan-dari-kerukunan-bubuhan-banjar-kalteng> , Wabup HST terima bantuan dari Kerukunan Bubuhan Banjar Kalteng, 1 Februari 2021.
2. <https://metro7.co.id/kerukunan-bubuhan-banjar-kbb-provinsi-kalteng-serahkan-bantuan/> , 2 Februari 2021.

Catatan:

- **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah**
 - Pasal 1 angka 15 mendefinisikan Bantuan Sosial sebagai pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, dan menjelaskan resiko sosial dalam pasal 1 angka 16 sebagai resiko

sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.

- Pasal 22 ayat (1) menyatakan Pemerintah daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah, dan dilanjutkan pada Pasal 22 ayat (2) yang menyampaikan pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan urusan pilihan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.
- Kemudian mendeskripsikan anggota/kelompok masyarakat dalam Pasal 23 sebagai “individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum;” atau “lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.”
- Dalam Pasal 24, Pemberian Bantuan Sosial dipersyaratkan harus diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial; Diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial; Penerima Bantuan harus memiliki identitas yang jelas dan berdomisili dalam wilayah administratif pemerintahan daerah berkenaan; Pemberian Bantuan Sosial dilanjutkan pada tahun anggaran berikutnya atau diberhentikan melihat apakah Penerima Bantuan Sosial telah lepas dari Resiko Sosial; Secara singkat tujuan pemberian Bantuan Sosial meliputi rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, pemberdayaan sosial, jaminan sosial, penanggulangan kemiskinan, dan penganggulangan bencana.
- Pada Pasal 25 disampaikan,

- ✓ Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf a ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
- ✓ Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf b ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
- ✓ Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf c ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
- ✓ Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf d merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
- ✓ Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf e merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
- ✓ Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf f merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.
- Jenis dari Bantuan Sosial dijelaskan pada Pasal 26, dengan pengaturan sebagai berikut:
 - ✓ Bantuan sosial dapat berupa uang atau barang yang diterima langsung oleh penerima bantuan sosial.
 - ✓ Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin,

masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.

- ✓ Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.
- Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran bantuan Sosial Secara Non Tunai mengatur pemberian Bantuan Sosial sebisa mungkin diberikan dalam bentuk Non Tunai dengan ketentuan lebih detil pada Peraturan Dimaksud.